

## BAB II

# KONDISI POLITIK NASIONAL MENJELANG KELAHIRAN GOLKAR

Dalam meneliti tentang suatu organisasi politik perlu dijelaskan tentang kondisi perpolitikan yang mendukung kelahiran organisasi politik itu. Hal ini sebagai pengantar dalam memahami organisasi politik sejak awal didirikannya. Feith menuliskan setelah pemilu 1955 menghasilkan parlemen yang mudah goyah akibat koalisi yang lemah antara berbagai partai politik. Pergolakan-pergolakan politik yang terjadi di tingkat parlementer pada akhir 1956<sup>18</sup> mulai bergeser pada daerah-daerah di luar Jawa. Daerah-daerah merasa kurang puas terhadap pemerintah pusat yang cenderung mengabaikan daerah-daerah di luar Jawa. Bersamaan dengan itu pengaruh partai Masyumi di bidang pemerintahan mulai semakin menurun.<sup>19</sup> Menurunnya pamor Masyumi di bidang pemerintahan membuat penduduk Indonesia di luar Jawa semakin bergolak.

Pergolakan politik mencapai krisis ketika penduduk Indonesia terutama di luar Jawa mulai mengabaikan pemerintahan. Hal ini makin terbukti sebagian besar pimpinan militer di luar Jawa mendirikan suatu usaha dengan motif ekonomi. Misalnya, di Minahasa para tentara, petani dan tokoh setempat menyita yayasan

---

<sup>18</sup> Setelah pemilu 1955, dan menghasilkan parlemen dengan koalisi yang lemah, membuat kondisi perpolitikan di Indonesia mengalami masa-masa sulit tentang pemilu 1955, lihat Herbert Feith, *The Election of 1955*

<sup>19</sup> Partai Masjumi memiliki dukungan di luar daerah Jawa (lihat lampiran 1 hasil pemilu 1955).

kopra dengan pusat di Jakarta dan mendirikan yayasan kelapa Minahasa. Mereka kemudian menyelundupkan kopra serta menjual kopra tersebut.<sup>20</sup> Pada 1957 partai IPKI, Masjumi, dan Perti menarik dukungannya pada kabinet dan menginginkan dibentuk kabinet baru. Hal itu akibat anggapan bahwa umumnya merasa kurang puas terhadap kebijakan kabinet Ali Sastroamidjo yang dinilai menelantarkan luar Jawa.

### A. Pembentukan Dewan Nasional

Ketidakstabilan politik pada masa demokrasi parlementer,<sup>21</sup> dipandang oleh Soekarno sebagai hal yang tidak cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia. Hal itu terungkap dalam ucapannya pada generasi muda:

*Let us be frank about it, brothers and sister. We made a very great mistake in 1945 when we urged the establishment of parties, parties, parties. Now that mistake is wreking its vengeance upon us...I know that the young people who are politically aware do indeed want a nation that is not spil by parties and more parties... My dream is that the leaders of parties would meet, would*

<sup>20</sup> Pimpinan militer di daerah yang melakukan penyeludupan Mayor Worang, putera Minahasa, dan Kolonel Waraow, komandan Resimen Sulawesi Utara, Ulf Sudhaussen, *op. cit*, hlm 185., panglima Sumatera Utara (Simolon) juga mengadakan penjualan dalam jumlah yang besar atas kopi dan karet.

<sup>21</sup> Semenjak demokrasi Parlementer, misalnya (1956), pada saat Kontituante bersidang untuk menyusun UUD-RI, Indonesia dilanda pergolakan dengan berdirinya Dewan Gajah, Dewan Banteng, Dewan Garuda, Dewan Manguni, Dewan Lambung Mangkurat. di tahun 1957 terjadi banyak pemberontakan di daerah-daerah, misalnya Lt.-Col. Sumual mengambil alih pemerintahan di Ujungpandang (Permesta), juga beberapa orang (daerah) yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Indonesia, misalnya 15-Februari 1958 PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia ) di-dekrarasikan di Bukittinggi. Prawiranegara sebagai presiden PRRI. Tanpa pengarang, The Soekarno years 1950-1965, <http://www.gimona.com/sejarah/sejarah09.html>. Hal ini mengakibatkan antara (1957- 1959) kedudukan dalam angkatan darat bertambah dengan ketujuh tentara dan teritorium dipecah menjadi enam belas Komandao Daerah Militer (Kodam), misalnya TT I dipecah menjadi tiga Kodam :Kodam I /Iskandar Muda (Aceh), Kodam ii/Bukit Barisan (Sumatera Utara), Kodam III/17 Agustus (Sumatera Barat, Riau), TT V mencakup Jawa Timur dan Madura sebagai Kodam VIII/Brawijaya.

*consult together with one another, and then come together to the decision of "Let us now join together to bury all parties."<sup>22</sup>*

Kurang lebih artinya:

Marilah kita melihat dengan seksama, saudara-saudaraku. Kita membuat kesalahan yang besar pada tahun 1945 dengan lebih mementingkan partai-partai, partai, dan partai. Sekarang kesalahan hal itu telah memberi beban yang berat pada kita... Saya mengetahui orang-orang muda yang memiliki kepedulian pada perpolitikan bangsa menginginkan bangsa yang tidak ada partai-partai dan lebih banyak partai... Saya mempunyai harapan para pemimpin-pemimpin partai-partai bertemu dan bermusyawarah, yang kemudian para pimpinan partai-partai bersama-sama membuat keputusan "Marilah bersama-sama kita kuburkan partai-partai".

Menurut pandangan politik Soekarno kekacauan yang terjadi di Indonesia, pada masa era demokrasi parlementer itu disebabkan oleh banyaknya partai politik, sehingga seakan-akan rakyat Indonesia terkotak-kotak dalam suatu ideologi partai politik. Sistem demokrasi parlementer yang membuat perdana menteri lebih aktif dalam pemerintahan. Tidak mampunya demokrasi parlementer mengatasi kekacauan di Indonesia itu, maka oleh Soekarno ditawarkan beberapa konsep; yaitu: *pertama*, sistem pemerintahan baru yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin. *Kedua*, pembentukan kabinet gotong-royong, yang multi partai. *Ketiga*, dibentuk Dewan Nasional yang terdiri dari sebagian besar golongan fungsional.

---

<sup>22</sup> Ken Ward, *op. cit.*, hlm 24.

Nampaknya, Soekarno telah lama memikirkan suatu golongan fungsional dalam Badan Perwakilan Rakyat. Seperti dalam ucapannya :

*"Andaikata tuan menjadi pemerintah di salah satu negeri yang saya sebutkan tadi. Niscaya tuan, menurut kehendak asas demokrasi itu, mengadakan suatu badan perwakilan rakyat, yang disitu duduk utusan-utusan dari seluruh rakyat, zonder memperbeda-bedakan keyakinan. Utusan-utusan dari kaum yang seratus persen rasa keislamannya, utusan-utusan dari kaum Kristen, dari kaum tiada agama, dari kaum intelektual, kaum dagang, kaum tani, kaum buruh, kaum pelayaran, pendek kata utusan-utusan dari seluruh tubuhnya bangsa, dari seluruh tubuhnya natie".<sup>23</sup>*

Ucapan ini mengandung arti Soekarno ingin membentuk suatu golongan fungsional dalam suatu badan negara yang resmi, terdiri dari wakil-wakil berbagai golongan di masyarakat dan juga wakil-wakil dari kaum profesional.

Presiden Soekarno di hadapan 900 tokoh partai, pada tanggal 21 Februari 1957 mengemukakan bahwa Indonesia memerlukan suatu pemerintahan yang terdiri dari semua partai besar. Di samping itu, mengusulkan dibentuknya suatu dewan nasional, yang nantinya mendapat tugas untuk membantu kabinet. Yang menarik dari usulan ini adalah anggota dewan nasional mencakup wakil-wakil dari golongan fungsional, seperti buruh, tani, cendekiawan, dan lain-lain.<sup>24</sup> Pembentukan golongan fungsional ini menurut Paulus Widiyanto<sup>25</sup> merupakan upaya dari Soekarno dan militer untuk melemahkan posisi partai-partai politik. Wakil-wakil dari golongan

---

<sup>23</sup> Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Vol.1. (Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, cetakan ke-2, 1963), hlm.283.

<sup>24</sup> Golongan-golongan inilah yang dapat dikatakan embrio dari Sekber Golkar, Ulf Sundhaussen, *Ibid.*, hlm. 188.

<sup>25</sup> Paulus Widiyanto, "Osa Maliki dan Tragedi PNI konflik Intern Pra dan Pasca 1965", dalam *Prisma*, edisi khusus 20 tahun 1971-1991, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1991), hlm. 17.

fungsional ini merupakan badan perwakilan resmi negara pertama yang dibuat oleh Presiden Soekarno.

## B. KONSEP NASAKOM

Ketidakstabilan politik di Indonesia dan kondisi keamanan serta konflik, sebut saja Angkatan Perang Ratu Adil, DI/TII, Republik Maluku Selatan, membuat kekacauan yang tidak sedikit pada kondisi Republik Indonesia. Hal ini masih ditambah lagi dengan krisis kabinet yang jatuh-bangun (18 kabinet), juga *polarisasi* pada partai-partai. Melihat hal ini, militer dan juga Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal, tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Maka pada tanggal 13 Maret 1957, Presiden Soekarno mengumumkan berlakunya Undang-Undang Keadaan Bahaya (UUKB). Dilanjutkan (9 April 1957) membentuk *Zakenkabinet*, di bawah pimpinan Ir. Djuanda, yang kemudian disebut Kabinet Karya.<sup>26</sup>

Ajakan Presiden Soekarno (22 April 1959) dalam amanatnya kepada segenap rakyat Indonesia menganjurkan untuk kembali kepada UUD'45. Anjuran ini juga disampaikan ke Konstituante. Terhadap gagasan ini Konstituante kemudian mengadakan pemungutan suara, tapi tidak memperoleh keputusan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Setelah sebelumnya pada tanggal 14 Maret 1957 Pedana Menteri Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya ke Presiden. Menteri luar negeri pada kabinet karya adalah Soebandrio dan Chaerul Saleh Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hlm. 100.

<sup>27</sup> Dalam tiga kali pemungutan suara di Konstituante ternyata tidak diperoleh 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir, syarat untuk penetapan sebuah UUD, menurut pasal 37 (UUDS 1950). Pemungutan suara pertama tanggal 29 Mei 1959, menghasilkan 201 suara setuju dan 265 suara tidak setuju. Pada tanggal 30 Mei 1959 hasilnya 269 lawan 199 dari jumlah 474 orang anggota. Pemungutan suara ketiga tanggal 2 Juni 1959 tetap tidak dicapai kuorum. Menjelang 1959 Letnan Jenderal Nasution atas nama Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), mengeluarkan Peraturan Penguasa

Presiden Sukarno kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.<sup>28</sup> Tindakan Presiden berikutnya adalah membentuk Kabinet kerja, pada tanggal 13-Juli 1959, DPR diganti melalui Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960, keanggotaan DPR-GR sesuai dengan Keputusan No.156/1960 tanggal 4 Juni 1960.<sup>29</sup> MPRS ditetapkan dengan Penetapan Presiden No. 12 tahun 1959.<sup>30</sup> Beliau juga membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara melalui Penpres No. 3 Tahun 1959.<sup>31</sup> Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah (pasal 16 UUD1945).

Perkembangan selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1959, dengan peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 dibentuklah Front Nasional, dengan tujuan:

- a. Penyelesaian Revolusi Nasional Indonesia.
- b. Melaksanakan Pembangunan Semesta Nasional
- c. Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Juga mempunyai tugas pokok, yakni:

---

Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat No Pri/Peperpu/040/1959 tertanggal 3 Juni 1959 yang melarang adanya kegiatan-kegiatan politik, M. Sjafe'i Hassanbasari, <http://bubu.com/kampus/September96/index.htm> No.004/VIII/96KO

<sup>28</sup> Pelaksanaannya dibantu ABRI, isi Dekrit: setuju kembali kepada UUD 1945, setia pada perjuangan RI, dan setuju Manifesto Politik, serta pembentukan MPRS Marwati Djoened, op. cit. , hlm.311. Nugroho Notosusanto, *Pejuang dan Prajurit*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) , hlm. 102.

<sup>29</sup> Terdiri dari 44 PNI, 36 NU, 30 PKI, 118 golongan fungsional non-ABRI, dan 35 ABRI

<sup>30</sup> Komposisinya 283 anggota DPRGR, 94 utusan daerah dan 232 Golongan fungsional. Nugroho Notosusanto, *Ibid*, hlm. 103.

<sup>31</sup> Terdiri dari 12 orang wakil golongan partai politik, 8 wakil utusan daerah, 24 orang wakil golongan fungsional, 1 orang wakil ketua, Anggota DPA sebagian berasal dari Dewan Nasional yang telah dibentuk sebelumnya, Marwati Djoened, *Sejarah Nasional jilid 6* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992 , hlm. 225 dan hlm. 312.

- a. Menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam masyarakat, serta memimpin gerak masyarakat untuk menyelesaikan Revolusi Nasional dalam pembangunan semesta, kesejahteraan sosial, pertahanan keamanan.
- b. Menyelenggarakan kerja-sama yang erat-eratnya dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.<sup>32</sup>

Golongan fungsional yang terbentuk anggotanya terdiri dari: buruh 2 orang, tani 2 orang, pemuda 2 orang, bekas pejuang 1 orang, pengusaha 1 orang, seniman 1 orang, wartawan 2 orang, wanita 2 orang, angkatan'45 2 orang, ulama 2 orang, pendeta Protestan 1 orang, pendeta Hindhu/Bali 1 orang, turunan asing 2 orang, wakil daerah 14 orang, kelompok ABRI 5 orang, ketua atau wakil ketua dan sekretaris 3 orang.<sup>33</sup> Diketahui kemudian Front Nasional ini, anggotanya ada yang berafiliasi dengan partai politik, hal ini sangat wajar di tengah kehidupan politik dan Nasakominasi. Sangat jelas Presiden Soekarno banyak sekali membentuk lembaga negara yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional baik itu di tingkat DPR-GR, MPRS, DPA, dan Front Nasional.

### C. Implementasi Nasakom di Jawa Timur

Kondisi politik nasional semenjak Presiden Soekarno mengeluarkan dekret dipenuhi dengan garis politik Nasakom. Presiden Soekarno giat berkampanye tentang konsep Nasakom, misalnya di Surabaya pada acara proklamasi 17 Agustus 1965,

---

<sup>32</sup> Nugroho Notokusanto, *op. cit.*, hlm. 108.

<sup>33</sup> Awad Bahasoan, *op. cit.*, hlm. 268.

Soekarno kembali memberikan pidatonya tentang perlunya kekuatan-kekuatan Nasionalis, Agama, dan Komunis; berjalan beriringan.<sup>34</sup> Pada acara-acara resmi yang diadakan oleh pemerintah, seringkali ditekankan adanya konsep Nasakom. Misalnya pada masa menjelang peristiwa September 1965 di pelataran kotamadya Surabaya seringkali digelarkan berbagai kesenian dengan mengambil garis pokok pada konsep Nasakom. Kaum nasionalis diwakili dengan mempertontonkan kesenian tradisional dari daerah-daerah di Indonesia, dari agama dipertontonkan nyanyian shalawat diiringi dengan alat musik Hadrah, kemudian dari kaum komunis menampilkan tari-tarin gadis belasan tahun yang menari dengan diiringi lagu genjer-genjer.<sup>35</sup>

Partai komunis di Jawa Timur memiliki banyak pendukung antara lain SOBSI dan BTI dengan perjuangan kelasnya mendesak pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil. UU tentang pengembalian tanah-tanah kepada rakyat/buruh/tani.<sup>36</sup> Pengambil-alihan tanah-tanah dari para tuan tanah tidak jarang mengakibatkan terjadinya gesekan antara para kyai (tokoh NU selaku pemilik tanah) dan pendukung partai komunis.<sup>37</sup> Gesekan antara pendukung partai komunis dan militer juga sering terjadi, terutama semenjak Nasionalisasi perusahaan milik asing. Ada benturan kepentingan antara para buruh dengan militer yang biasanya menjadi pimpinan perusahaan-perusahaan negara.

---

<sup>34</sup> Pada Atjara Perayaan-Perayaan Dwi Dasawarsa di Tugu Proklamasi, acara dimulai pukul 08.00 pagi, dalam *Surabaya Post*, Sabtu 19 Agustus 1965.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Pudji Rahardjo, dan cerita yang didengar penulis dari orang-orang yang mengalami masa-masa tersebut.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Pudji Rahardjo pada tanggal 10 Juli 2002.

<sup>37</sup> Menurut Pudji Rahardjo sebagian tokoh NU dapat disebut tuan tanah.



Pada tahun 1963 mulai terlihat suasana politik yang semakin panas. Menurut Sulastomo (mantan ketua HMI tahun 1963-1966) meskipun di atas panggung terbuka kekuatan “A, Nas dan Kom” kelihatan rukun, namun sebenarnya ketiganya sedang menyusun kekuatan. Polarisasi yang terbentuk adalah antara komunis dan anti komunis.<sup>38</sup>

Indikasi terjadinya polarisasi itu dapat dilihat pada ceramah D.N. Aidit yang meminta pembubaran HMI.<sup>39</sup> Polarisasi juga terjadi di Jawa Timur seorang Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Brawijaya cabang Jember Ernest Utrecht menetapkan HMI sebagai organisasi mahasiswa terlarang di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya cabang Jember<sup>40</sup> Nampak sekali adanya polarisasi antara HMI (yang merupakan organisasi mahasiswa Islam) dan partai komunis Indonesia di Jawa Timur. HMI juga sering melakukan demonstrasi ofensif untuk menyerang tokoh-tokoh yang dikira pro PKI.<sup>41</sup> Menurut Sulastomo<sup>42</sup> pada masa 1963-1965 di jajaran partai politik antara PKI, NU, PNI sudah saling menunjukkan kekuatan fisiknya. Hal ini tercemrin dari acara-acara yang diselenggarakan, mencerminkan “*show of force*” yang selalu disertai keluarnya barisan pemuda dengan drumbandnya yang siap

<sup>38</sup> Kemudian dapat kita golongkan kekuatan komunis adalah Partai Komunis Indonesia, BTI, SOBSI CGMI, Pemuda Rakyat, dan lainnya. Kemudian di pihak anti komunis dapat kita sebutkan para organisasi NU, para militer (AD) yang kemudian membentuk Sekber-Golkar, HMI, PMII dan lainnya.

<sup>39</sup> Ceramah di depan kursus Tavip Permusyawaratan Pelajar Indonesia, tanggal 13 Maret 1965, “seharusnya tidak ada plitak-plitut dalam tubuh HMI. Saya (Aidit) menyokong penuh tuntutan pemuda, pelajar, dan mahasiswa Indonesia yang menuntut pembubarann HMI. Sulastomo, *Hari-Hari Yang Panjang 1963-1966*, (Jakarta: Kompas, 2000, hlm. 15.

<sup>40</sup> Melalui ketetapan No. 2/64 tertanggal 12 Mei 1964, Sulastomo, *Ibid*, hlm. 14. Polarisasi juga terjadi di bidang kebudayaan antara Manikebu dan Lekra.

<sup>41</sup> HMI memang pada waktu itu sering mengadakan demo memprotes tokoh-tokoh yang dianggap pro-PKI agar segera diganti (Prof. Priyono, menteri P dan K pada waktu itu didemo oleh organisasi HMI untuk segera dicopot karena dianggap pro PKI), *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 24 dan 32.

menghadapi sesuatu yang mungkin terjadi. Penghujung tahun 1965 gerombolan PKI, Pemuda Rakyat, BTI, telah menyerbu acara Mental Training yang diselenggarakan PII (Pelajar Islam Indonesia) di Kanigoro (Kediri).<sup>43</sup> Penyerangan itu dibalas oleh GP Ansor dengan menerjunkan massa sebanyak delapan truk untuk menggempur PKI di daerah Kanigoro. Di Malang juga terjadi peristiwa yel-yel menuntut pembubaran HMI, yang kemudian diikuti dengan bentrok fisik antara pendukung PKI dengan solidaritas Islam.

Demikian sebagai gambaran keadaan politik Jawa Timur pada masa Nasakomisasi, yaitu penuh dengan polarisasi dan konflik antara berbagai unsur Nasakom.

#### D. Peran Militer dalam Politik

Keterlibatan militer dalam politik dapat diurutkan dari sejarah. Sejak awal berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) memprakarsai manuver politik menentang keputusan Perdana Menteri Sjahrir. Sesungguhnya hal itu sudah menunjukkan dasar historis yang kuat betapa sejak awal berdirinya ABRI ingin menerjunkan diri dalam "power play" di bidang politik di negeri ini.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Mochtar Masoed, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia, "Sebelum dan Sesudah Runtuhnya rezim Soeharto"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 63.

<sup>44</sup> Keinginan militer untuk ikut berpolitik tercermin dari ketidaktaatan pimpinan militer pada Perdana Menteri Sjahrir sebagai Perdana Menteri menunjuk Amir Syarifuddin duduk sebagai Menteri Keamanan, namun pucuk pimpinan tentara Kepala Markas Besar Umum TKR Letjen Oerip Soemohardjo lebih condong untuk mengajukan pilihannya pada perwira Peta Sudirman sebagai Panglima Besar TKR dan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Keamanan. Militer seakan ingin sebagai pihak yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, utamanya yang berkenan pada intern militer. Lihat juga peristiwa 17 Oktober 1952, pada waktu itu militer mengepung gedung wakil

Pada November 1958 Nasution (KASAD) memberikan penegasan tentang Dwi Fungsi ABRI, yaitu disamping sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan juga berperan dalam pembangunan. Posisi ini disebut (*The Army's Middle Way*) atau disebut "jalan tengahnya ABRI".<sup>45</sup>

ABRI melalui operasi militernya diyakini berhasil dalam rangka pembebasan Irian Barat dan kembali pada RI.<sup>46</sup> Soekarno telah merasakan kekuatan di tubuh ABRI, yang saat itu komando lebih banyak dikendalikan oleh Nasution.<sup>47</sup>

Pertumbuhan PKI semakin progresif. Melalui onderbouwnya, seperti BTI (Barisan Tani Indonesia), SOBSI dan Pemuda Rakyat. PKI menuntut pemerintah melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) juga mulai menggarap desa-desa dan mengeluarkan slogan "Tujuh Setan Desa".<sup>48</sup> PKI di daerah-daerah juga melakukan perampasan tanah, yang dikenal sebagai aksi sepihak. Soekarno mengetahui partai komunis sekan-akan

---

rakyat, dan menginginkan militer untuk terwakili dalam Badan Perwakilan Rakyat dan peran yang aktif di bidang sosial-politik.

<sup>45</sup> Soebijino, dkk, *Dwifungsi ABRI, "Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia"*, hlm. 25 dan 48. Pada awal Orde Baru kekaryaan anggota ABRI ditetapkan dalam TAP MPRS No. XXIV/MPRS/1966.

<sup>46</sup> Penyerahan Irian Barat kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, namun sebelumnya telah diadakan operasi-operasi militer (Operasi Mandala) untuk merebut Irian Barat, meskipun akhirnya dicapai perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang ditengahi PBB.

<sup>47</sup> Peran ABRI terutama angkatan darat, juga atas jasa Nasution telah banyak sekali mengamankan wilayah Republik Indonesia, misalnya dari para kelompok orang yang ingin melepaskan diri dari wilayah kesatuan. Dalam panggung politik Indonesia. Nasution juga tercatat berhasil mengagalkan kudeta dari para militer yang bersimpati kepada PSI (Letnan Kolonel Kemal Idris), militer yang menolak orientasi Jawa (Mayor Djaelani Inspektur Pendidikan dan Latihan Darat (RPKAD), juga Mayor Suwanto yang nampaknya menolak kebijakan Soekarno, mereka sudah mengepung Jakarta dengan pasukan bersenjata namun berhasil digagalkan oleh Nasution. Untuk lebih lengkap, baca Ulf Sundhaussen, *op. cit.*, hlm. 176-185

<sup>48</sup> Mereka yang disebut setan itu adalah tuan tanah, lintah darat, tengkulak, tukang ijon, kapitalis birokrat, bandit desa, serta pengirim zakat. Lihat Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai*, (Jakarta: CV. Sri Murni 1988), hlm. 129-130.

berusaha merebut kursi kepemimpinan perusahaan hasil Nasionalisasi yang diduduki oleh militer, dan mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan hasil Nasionalisasi tersebut adalah milik buruh serta harus dikembalikan pada buruh. Dalam perkembangan selanjutnya, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan presiden Soekarno, PKI, dan militer.<sup>49</sup>

Untuk menghadapi PKI militer membentuk Badan Kerja Sama (BKS) Militer-Sipil, BKS Pemuda-Militer, BKS Ulama-Militer, BKS Angkatan 45-Militer, BKS Pengusaha-Militer, dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

ABRI mungkin pada saat itu memang sebagai kekuatan yang mengamankan Negara, dan Soekarno merasa ABRI seharusnya diberikan kedudukan dalam pengambilan keputusan Negara. Melalui dekrit itu pula, ia minta agar terjadi perubahan DPR. Yang semula atas pertimbangan pemilu, diganti didasarkan menurut pemerintah (tanpa memperhatikan pertimbangan dalam pemilu sebelumnya). Ia sendiri yang akhirnya melantik 35 anggota ABRI sebagai bagian dari 283 anggota DPR-GR pada 25 Juni 1960. Inilah tonggak awal keikutsertaan pertama ABRI sebagai bagian dari lembaga legislatif. Sebagai landasan pertimbangan agar peran sosial politik ABRI bisa tersalur, sedangkan ABRI tidak diperbolehkan mengikuti pemilu, maka sudah sewajarnya jika sebagian kursi DPR "dijatahkan" kepada ABRI.

Demokrasi Terpimpin dieksperimentasikannya dengan tetap menjaga ketegangan antara dua pilar pendukungnya: ABRI dan PKI. Namun koalisi antara

---

<sup>49</sup> Marwati Djoened, dkk, *op. cit.*, hlm. 317, yang dimaksud adalah masa 60-an.

<sup>50</sup> Sejak tahun 1957, lihat Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hlm 245.

Soekarno dengan ABRI tidak berjalan harmonis. Manuver dan infiltrasi kader-kader PKI pun makin mengancam integritas korps perwira ABRI.<sup>51</sup> Periode selanjutnya, Sukarno mulai dekat dengan DN Aidit, ketua PKI.<sup>52</sup> Hal ini juga dikarenakan PKI selalu mendukung pendapat Presiden Soekarno, dan ingin menjadi pelopor dalam paham "Nasakom". DN Aidit berkata melaksanakan Manipol secara konsekuen adalah sama dengan menjalankan program PKI.<sup>53</sup> Dengan status sebagai panglima tertinggi ABRI, ia memberikan jabatan setingkat Menteri kepada kepala-kepala angkatan dan kepolisian agar bertanggungjawab langsung kepada panglima tertinggi/presiden (pasal 10 UUD'45). Dan upayanya yang lain adalah menghapuskan keadaan bahaya, sehingga mengurangi peran aktif militer. UU keadaan Bahaya diakhiri 1 Mei 1963.<sup>54</sup>

Tak ingin kehilangan peran sosial politiknya, ABRI melakukan beberapa langkah untuk menanggulangi dua kekuatan politik ini. *Pertama*, mendorong golongan-golongan fungsionaris/karya dalam perebutan di bidang politik. Hasilnya adalah terbentuknya Sekber Golkar, 20 Oktober 1964. *Kedua*, menempatkan aparat teritorial di tingkat kecamatan berbentuk Koramil, di tingkat desa berbentuk Babinsa. *Ketiga*, mendorong dibentuknya Resimen Mahasiswa (Menwa) di bidang pendidikan untuk mengimbangi gerak kader CGMI (Corp Gerakan Mahasiswa Indonesia) dan Pemuda Rakyat yang pro-PKI di kampus-kampus. *Keempat*, memberikan dukungan

---

<sup>51</sup> Melalui slogan tentara kelima (Buruh dan Tani) dipersenjatai. Militer merasa tersaingi tingkat profesionalismenya.

<sup>52</sup> Pada tahun 1960-an Presiden Soekarno banyak memberikan kedudukan pada DPR-GR, serta pengurus dari Front Nasional pusat dan daerah pada anggota/pendukung partai PKI.

<sup>53</sup> Marwati Djoened, *loc. cit.*, hlm. 317.

kepada SOKSI, MKGR dan Kosgoro. *Kelima*, mendirikan surat kabar propaganda *Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha* untuk mengimbangi *Harian Rakjat, Warta Bakti dan Bintang Timur* milik PKI. Begitu pula didirikan Pusat Penerangan angkatan bersenjata untuk mengimbangi dominasi kader PKI di pucuk pimpinan Kantor Berita Antara.

Langkah-langkah ini, diyakini sangat berhasil, untuk meningkatkan peran sosial-politik ABRI. Hal inilah yang membawa upaya mensosialisasikan peran sosial politik ABRI tampak lebih nyata.

### E. Lahirnya Sekretariat Bersama Golongan Karya

Para Petinggi militer mendorong gerakan golongan fungsional seperti buruh, tani, pemuda, wanita, dan lain lain untuk menjadi warga yang otonom, yaitu dengan membentuk organisasi-organisasi fungsional dalam naungan Pengurus Besar Front Nasional. Lahirlah organisasi yang dipelopori oleh para perwira AD :

- a. Kosgoro sebagai organisasi fungsional (Koperasi) non-politik.
- b. MKGR sebagai organisasi fungsional; spiritual yang non-politik.
- c. Soksni sebagai organisasi fungsional material (buruh, tani, nelayan) yang melaksanakan kegiatan politik praktis, menghadapi PKI dan onderbouwnya.<sup>55</sup>

Pada tahun 1963 dibentuk Musyawarah Kekaryaan Indonesia (MKI) yang berfungsi sebagai wadah dari golongan-golongan fungsional yang pro pada militer.

---

<sup>54</sup> Soebijono, dkk, *op. cit.*, hlm. 29.

<sup>55</sup> Andreas Pandiangan, *op. cit.*, hlm. 30.

SOKSI awalnya sangat menentang hal ini, karena tidak sesuai oganisasinya. SOKSI melaksanakan politik praktis, sedangkan tujuan golongan fungsional yang lain tidak demikian.<sup>56</sup> Kemudian pada tahun 1964 dengan diprakarsai beberapa tokoh militer<sup>57</sup> MKI dirubah mejadi Musyawarah Kerja Karyawan Indonesia (MKKI).

Organisasi MKKI hanya berumur beberapa bulan dan membubarkan diri, karena dituduh oleh partai komunis sebagai tandingan dari Front Nasional. Dalam suatu pertemuan pada bulan Oktober 1964 dalam upaya koordinasi dari golongan-golongan fungsional dalam front Nasional menghasilkan keputusan, antara lain: Perlu dibentuk Sekretariat Bersama (Sekber) golongan fungsional dalam FN untuk memperjuangkan kepentingan organisasi anggota FN.<sup>58</sup>

Dalam suatu pertemuan yang diprakarsai oleh Brigjen TNI Djuhartono: wakil Sekjen PBFN, Drs. Iman PBFN, J.K.Tumakaka; anggota PBFN.<sup>59</sup> membuahkan pemikiran :

- a. Sekber Golkar harus diorganisir di dalam FN sendiri, jangan di luar tubuh FN
- b. Bentuk organisasi tingkat pertama berbentuk "Sekber", dan dicantumkan anggota FN, untuk mengamankan sebagai tandingan dari FN.
- c. Sebagai modal pertama untuk digerakkan, anggota PBFN (Pengurus Besar Front Nasional, yang tidak terikat (non afiliasi) mulai mendaftarkan diri di FN.

---

<sup>56</sup> Nugroho Notosusanto, *op. cit.*, hlm.110.

<sup>57</sup> Antara lain Djuhartono (Brigadir Jenderal), Muktio (Kolonel), Sutjipto S.H. (Brigadir Jenderal) dan Mashuri.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 111-112.

<sup>59</sup> Andreas Pandiangan, *op. cit.*, hlm.32.

- d. Pengorganisasian bersama-sama dengan ABRI dalam satu tingkat yang sederajat, dengan penggolongan menurut jenis-jenis golongan karya.

Atas dukungan militer diadakan rapat pleno dari golongan karya. Dari 97 organisasi yang hadir pada rapat pleno pada tanggal 20 Oktober 1964, ada 61 organisasi golongan karya anggota FN menjadi anggota Sekber Golkar. Sejak saat itu tanggal 20 Oktober 1964 diperingati sebagai hari lahirnya Sekber Golkar<sup>60</sup>

Kemudian pada tanggal 25 Februari 1965, dicetuskan mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Untuk itu dibentuk panitia Nasional Mukernas, yang direncanakan 7-9 Oktober 1965.<sup>61</sup> Mukernas ini gagal dikarenakan peristiwa 30 September 1965.

Setelah peristiwa 30 September, pada tanggal 20 November 1965, pimpinan Golkar menghadap Presiden, minta persetujuan akan penyelenggaraan Mukernas I.<sup>62</sup> Mukernas I berlangsung di Tjibogo pada tanggal 9-11 Desember 1965.

Hasil dari Mukernas I meliputi<sup>63</sup> :

#### 1. Haluan perjuangan Golkar

<sup>60</sup> Organisasi yang hadir pada rapat pleno: 10 organisasi pemuda/mahasiswa, 10 Organisasi sarjana/cendekiawan, 5 Organisasi Wanita, 4 Organisasi Wartawan, 2 Organisasi Tani dan Nelayan, dan 9 kategori lain, 53 organisasi buruh/pegawai negeri, 4 organisasi Angkatan Bersenjata. Lihat Sejarah Kelahiran Golkar, *Bahan Diklat Golkar*, tanpa pengarang Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Tingkat II kotamadya Surabaya, tanpa tahun), hlm. 16. Juga tanpa pengarang, *Pengetahuan tentang ke-Golkar-an Sejarah dan Perkembangan Partai Golkar*, (Jakarta: Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya, tanpa tahun), hlm. 10.

<sup>61</sup> Andreas Pangdiangan, *op. cit.*, hlm. 34-37.

<sup>62</sup> Dikutip dari Laporan Tahunan Sekber Golkar dalam keputusan Mukhtar I Sekber Golkar di Tjibogo, 9-11 Desember 1965, hlm. 48 dalam Andrea Pandiangan, *op.cit.*, hlm 41.

<sup>63</sup> Untuk hasil selengkapnya dari Mukernas, lihat lampiran 2.



2. Progam Aksi Sekber Golkar
3. Progam Konsolidasi Organisasi
4. Progam Pembinaan Perkaderan
5. Pernyataan (statement)

Pada Mukernas ini presiden Soekarno mengatakan :

“... revolusi kita yang berdasarkan Pancasila itu dengan segala aspirasinya adalah kiri, untuk mewujudkan masyarakat yang sosialis dimana kaum pekerja yang merupakan insan politik baru berjiwa Nasakom... saya minta engkau golongan karya. Engkau kaum pekerja Indonesia, sebagai salah satu potensi revolusi kita yang sedang tumbuh lebih merapatkan barisannya...”<sup>64</sup>

Dalam Mukernas Sekber Golkar, jelas sekali penggunaan nama Soekarno , Manipol, Sosialis, tokoh-tokoh Sekber Golkar sangat mendukung Soekarno. Organisasi Sekber Golkar sebenarnya sangat menjunjung nama Soekarno tetapi dalam program aksinya jelas-jelas menolak ideologi PKI, karena dari awal pembentukannya dilandasi membendung *ofensif* partai PKI.

Masalah mulai timbul ketika pada masa Sekber Golkar digunakan sebagai alat dan mesin Pemilu yang cocok, untuk melegitimasi dan menjamin posisi dominan militer. Orang-orang yang menduduki DPP (Dewan Pimpinan Sekber Golkar) adalah sangat pro Soekarno, upaya membersihkan dari orang-orang pendukung Soekarno dengan tuduhan dianggap (dituduh) terlibat G.30.S/PKI, diantaranya yakni J.K. Tumakaka Ketua urusan Indoktrinasi, Djuhartono dan Drs. Iman (yang ditahan dan

---

<sup>64</sup> AH. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas* jilid 6, (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1998), hlm. 354.

dinon-aktifkan).<sup>65</sup> Istilah-istilah yang berbaur Soekarno beserta ajarannya baik itu AD/ART ataupun hasil mukernas I kemudian disikirkkan/dibuang, Kemudian semenjak Sekber Golkar mengadakan Mukernas II (2-7 November 1967), kekuatan baru para militer dan pendukung Orde Baru sudah menguasai Sekber Golkar dengan tema Konsolidasi Golongan Karya mensukseskan Kabinet Ampera untuk memenangkan Orde Baru menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mukernas ke-II menghasilkan susunan DPP yang bergaris Orde Baru<sup>66</sup>

Organisasi Sekber Golkar yang meningkat dari 1965 berjumlah 64 menjadi 249 pada Agustus 1968. Demi melaksanakan hasil Mukernas, yaitu Panca Gagasan<sup>67</sup> sejumlah kelompok menggabungkan diri kemudian tergabung dalam beberapa kategori atas dasar kekaryaan masing-masing<sup>68</sup>, yaitu:

- a. Kelompok Golkar Pembangunan Material meliputi buruh, pegawai negeri, tani, nelayan/bahariwan, pedagang dan anggota koperasi/pengusaha Nasional.
- b. Kelompok Golkar Pembangunan spiritual meliputi : wanita, pemuda pelajar/ mahasiswa, cendekiawan/sarjana, guru, anggota-anggota golongan daerah dan

<sup>65</sup> Leo Suryadinata, *op.cit.*, hlm. 29. Juga Pengetahuan Tentang Ke-Golkar-An, tanpa penerbit tanpa tahun, hlm. 6-8.

<sup>66</sup> Yang diketuai oleh Mayjen S. Sukowati dibantu oleh 8 ketua, 1 Sekretaris Umum, 1 Wakil Sekretaris Umum, dan Bedhara sementara itu DPH (Dewan Pimpinan Harian) Sekber Golkar terdiri dari Ketua Umum: Mayjen Suparto Sokowati, dibantu oleh 8 Ketua, yaitu: Mayjen Djamin Ginting, Komodor RO Soenardi (AL), Drs Poerwoto (kepolisian), Mayjen Mas Isman (KOSGORO), Mayor E. Suwarna, SH (AU), Brigjen R.H. Sugandhi, Sekretaris Umum: Dr. Amino Gondokusumo, Wakil Sekretaris: Hutomo Honggowongso, SH, Bedaharamerangkap anggota: Ny. Sudarsono, SH, Anggota: Drs Radius Prawiro, Ir. P.C. Hardjosudirdjo, Brigjen Soedarmono, SH, Harun Umar, Marie Muhammad, Marzuki Lubis, Andreas Pandiangan, *op. cit.*, hlm 50-51, lihat juga Ridwan Saidi, *Seri Pendidikan Politik, Golkar Pasca pemilu 1992*, (Jakarta: Grasindo, 1993), hlm. 7.

<sup>67</sup> Isi dari Panca Gagasan lihat lampiran 2

generasi 45. Kelompok Golkar Agama meliputi: para ulama, pendeta Kristen/Katolik juga dari para agama Hindhu/Budha.

c. Kelompok Golkar Hankam meliputi: Polisi, AL, AU, AD, ditambah organisasi veteran dan Hansip/wanra

Waktu enam bulan yang diberikan kepada DPH untuk penyederhanaan organisasi Sekber Golkar, belumlah dapat menyederhanakan berbagai organisasi yang ada di tubuh Sekber Golkar. Pada 22 Januari 1969 antara unsur-unsur Sekber Golkar, yang diwakili oleh Ketua Umum Sukowati, Dr. Amino serta Wahono dan Amir Murtono (dari unsur Hankam). Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa organisasi profesi, meskipun bertingkat Nasional; sebaiknya tidak ikut dalam Pemilihan Umum. Kelompok profesi inilah yang akan memperoleh jatah pengangkatan sebagai karya non-ABRI.<sup>69</sup>

Masalah konsolidasi partai yang sebelumnya diserahkan oleh DPH dan tidak terselesaikan; Sokowati mengambil alaih tugas DPH dalam hal penyederhanan, melalui Surat Keputusan No. 507/1969 yang ditentukan bahwa keanggotaan Sekber Golkar haruslah melalui 7 kino (Kesatuan Induk Organisasi), yaitu:

1. Kino Kosgoro
2. Kino Soksi
3. Kino MKGR

---

<sup>68</sup> Ken Ward, *op. cit.*, hlm. 26.

<sup>69</sup> Mengenai organisasi karya yang tidak ikut dalam pemilu, kemudian ditetapkan oleh Presiden baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Presiden UU Nomor. 16 tahun 1969 bab I, pasal 1(4c). Lihat lampiran 5 UU Pemilu No. 15 dan No. 16 tahun 1969.

4. Kino Profesi
5. Kino Ormas Hankam
6. Kino GAKARI (Gabungan Karyawan Republik Indonesia), dan
7. Kino Gerakan Pembangunan.

Masing-masing kino, diketuai oleh ketuanya masing-masing, dan diketuai oleh Ketua Umum Sokowati; kino Hankam, ketuanya brigadir Jenderal Gatot Suwagijo, kino SOKSI, ketuanya Brigadir Jenderal Suhardiman, kino Profesi ketuanya Brigadir Jenderal Dr. Amino Gondokusumo, kino MKGR, ketuanya Mayor Jenderal Sugandhi, kino Kosgoro ketuanya Mayor Jenderal Isman, kino GAKARI ketuanya Mayor Jenderal Djamin Ginting, kino Gerakan Pembangunan ketuanya Sumiskum (Sipil). Dari 7 kino hanya satu kino yang diketuai oleh seorang Sipil.

Menyambut Pemilu 1971, pada 4 Februari 1970, tujuh kino yang menjadi inti Sekber Golkar mengeluarkan keputusan bersama untuk menjadi peserta pemilihan umum. Untuk itu, dipilihlah nama Sekber Golongan Karya ( Sekretariat Bersama Golkar). Tanda lambang yang digunakan dan lambang gambar pohon beringin. Jadi masing-masing (7 kino) hanya mempunyai satu tanda gambar. Disetujui juga bahwa kandidat yang akan di atasnamakan sebagai Golkar, bukan atas nama kino.

## F. Sekber-Golkar di Jawa Timur

Nama resminya adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya, atau biasa disingkat Sekber Golkar. Sekber Golkar merupakan organisasi dari berbagai unsur

petani, pelajar, wanita, para bekas pejuang, para tokoh agama, seniman, dan lainnya. Organisasi ini, didirikan sebenarnya termasuk peran ABRI dalam memerangi komunis dalam Front Nasional.<sup>70</sup> Idenya berasal dari gabungan orang-orang yang didasarkan profesi. Perwakilan pertama pada institusi politik Indonesia oleh Soekarno pada Dewan Nasional pada Mei 1957, kata karya berasal dari kata "Karyawan". Organisasi ini ditujukan utamanya untuk memerangi komunis. Untuk memerangi partai komunis yang membentuk organisasi buruh (SOBSI), dibentuk SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia), pada tanggal 20 Mei 1962 oleh Kolonel Suhardiman.<sup>71</sup> Awal mulanya organisasi ini dibentuk dari organisasi Karyawan Perusahaan Negara, yaitu perusahaan-perusahaan hasil dari Nasionalisasi perusahaan Asing. Organisasi SOBSI, ini mempunyai anggota yang besar, terutama pada karyawan-karyawan di perkebunan negara yang berjumlah ratusan orang karyawan. Pada masa itu para petani, harus menjual bahan pangan /Padi pada suatu badan yang ditunjuk oleh Pemerintah (Bulog).

Dalam organisasi SOKSI, diibaratkan para karyawan dan pimpinan dari perusahaan adalah merupakan suatu kesatuan, mereka harus bekerjasama dalam meningkatkan produksi, sementara suatu pemogokan adalah merupakan ketidakloyalan. Kelompok-kelompok fungsional dalam SOKSI, diorganisir dengan

---

<sup>70</sup> Harold Crouch, *op. cit.*, hlm 189

<sup>71</sup> Sementara 1963 sudah ada usaha pergantian nama buruh dengan nama Karyawan, yang salah satunya usul dari SOKSI, pada 1967 terjadi perubahan nama Kementerian atau Departemen Perburuan menjadi Kementerian Tenaga Kerja, menteri yang menjabat saat itu adalah Awaloedin Djamin (seorang jenderal dari kepolisian).

membentuk Konsentrasi Golongan Karya Buruh Indonesia yang kemudian berpartisipasi dalam Front Nasional.

Para pejuang dari berbagai pertempuran, anggotanya sebagian besar berasal dari pertempuran di Surabaya bergabung dalam mengembangkan usaha di bidang Koperasi bagi kesejahteraan mereka, membentuk KOSGORO (Koperasi Serba Usaha Gotong-Royong), berdiri sekitar tahun 1957, diketuai oleh Mayor Isman.<sup>72</sup> Tujuan utama organisasi ini adalah memberikan bantuan praktis pada masyarakat dengan menekankan pola kerjasama gotong-royong, bidangnya meliputi : kesehatan, agama, pendidikan, dan produksi makanan. Organisasi ini ikut serta di-dalam DPRGR dan Front Nasional.

Organisasi MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong), dibentuk pada tanggal 3 Januari 1960 oleh Kolonel Sugandhi. Dengan kegiatan meliputi bidang agama, sosial, pendidikan dan kebudayaan. Organisasi ini terdiri dari kelompok-kelompok fungsional yang berafiliasi dengannya.<sup>73</sup>

SOKSI, MKGR, KOSGORO kemudian disebut sebagai kelompok fungsional Trikarya. Ketiganya merupakan komponen yang utama di tubuh Sekber Golkar. Di tahun 1971 saat mengikuti pemilu 1971, ditulis oleh Ridwan Saidi<sup>74</sup> kelompok organisasi SOKSI, KOSGORO, dan MKGR adalah ormas yang menjadi tulang punggung Sekber Golkar.

---

<sup>72</sup> Awad Bahasoan, *op. cit.*, hlm. 276.

<sup>73</sup> Ken Ward, *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>74</sup> Ridwan Saidi, *Seri Pendidikan Politik...*, *loc. cit.*, hlm. 7.

Keberadaan Sekber Golkar di Jawa Timur tentulah tidak lepas dari posisi Sekber Golkar di tingkat pusat, dimana pendiriannya hampir sama dengan berbagai daerah lain di seluruh wilayah Indonesia.<sup>75</sup> kasus di Jawa Timur Organisasi Trikarya Sekber Golkar mengalami kelambanan dalam mendirikan cabang-cabangnya wilayah Jawa Timur.<sup>76</sup> Namun Sekber Golkar di Jawa Timur mengalami banyak keuntungan dengan adanya Ikabra (Ikatan karyawan Brawijaya), meskipun organisasi ini tidak tergabung dalam salah satu kino di tubuh Sekber Golkar, kontribusinya pada pemilu 1971 di Jawa Timur sangat besar bagi Sekber Golkar.

---

<sup>75</sup> Susunan pengurus Golkar Jawa Timur ketua: Moerman Slamet, Kino Soksi: Soenjoto B.A., Kino Kosgoro Djoko Soeharjo, Kino MKGR: Moerman S, Kino Profesi: Soelaiman, Hankam: Moch Said, Kino Gakari: Hajat Tjitrowongso, Kino Pembangunan: Moestahid Astain, dan Sekretaris Umum : Moch Said. Lihat anonim, *Pemilihan Umum 1971 di Jawa Timur seri II*, (Pemda Jatim: Surabaya, 1971), hlm. 35-36, serta Wawancara dengan Hudan Dardiri pada tanggal 20 Desember 2002.

<sup>76</sup> Ken Ward, *op. cit.*, hlm. 65

Setelah peristiwa September 1965, yang disebut "*tragedy of the 1965-1966 massacre*"<sup>77</sup> Setelah PKI dihancurleburkan, paham Soekarno yang khas mengenai persatuan nasional (Nasakom) hampir-hampir tidak mendapat dukungan dari angkatan bersenjata.<sup>78</sup> Nadhatul Ulama dan Partai Katolik mengutuk partai-partai yang lain agar membersihkan anasir-anasir mereka dari komunis. PNI bahkan mengatakan sifat anti komunisnya.<sup>79</sup>

Orde baru dimulai di Indonesia semenjak 1966,<sup>80</sup> yaitu semenjak pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto utamanya dalam penumpasan PKI. Di masa 1966, Jenderal Soeharto meneruskan gerakannya menangkap 15 orang menteri, termasuk Subandrio, dan kemudian menangkap dan memenjarakan 105 anggota DPRGR/MPRS pendukung Presiden Soekarno, baik dari PKI, Partindo, PNI dan sebagainya. Anggota-anggota DPRGR/MPRS yang ditangkap itu kemudian diganti dari KAMI/KAPPI dan dari kesatuan aksi lainnya. Jenderal Nasution, yang kini telah menjadi Ketua MPRS membawa Supersemar itu ke Sidang Umum MPRS. Pada 21 Juni 1966 keluarlah Ketetapan MPRS No IX tentang Supersemar. Dengan adanya

---

<sup>77</sup> Meminjam istilah yang digunakan oleh Pudji Rahardjo, *op. cit.*, hlm 73-156. Dalam buku ini digambarkan dan dituliskan korban-korban akibat dituduh anggota partai komunis ditahun 1965-an. Lihat lampiran 6.

<sup>78</sup> Dalam upacara di hadapan kursus reguler Lemhannas tanggal 31 Mei 1965, Soekarno mengeluarkan ide pembentukan tentara kelima (Buruh-Tani), dan Panglima AU Omar Dani menyetujuinya. Dalam gerakan yang dimulai 1 Oktober 1965, PKI juga menggunakan kekuatan militer, misalnya batayon 454/Diponegoro dan 530/Brawijaya, pasukan Cakrabirawa, pimpinan Angkatan Udara dituduh ikut terlibat dalam peristiwa ini. Yang dimaksud PKI tidak disukai oleh militer, adalah militer yang menumpas PKI, utamanya di bawah komando Soeharto. Sementara Soekarno ada anggapan terlalu melindungi PKI.

<sup>79</sup> Ulf Sundhaussen, *op. cit.*, hlm 389-391.

<sup>80</sup> Lahirnya Orba. Dalam hal itu dikemukakan beberapa tanggal yang dicalonkan sebagai tanggal lahir Orba yaitu 10 Januari 1966 (ketika pertama kali dilakukan demonstrasi Tritura), 11 Maret



Ketetapan MPRS tersebut, maka Presiden Soekarno tidak bisa lagi mencabut Supersemar.<sup>81</sup> MPRS juga mengeluarkan ketetapan tentang pelarangan usaha penumbuhan dan pengembangan doktrin-doktrin yang bertentangan dengan Pancasila, antara lain Marxisme-Leninisme atau Komunisme.<sup>82</sup>

Soeharto naik "tahta" sebagai pejabat presiden pada 1967, dan diresmikan sebagai presiden melalui Ketetapan (TAP) MPRS pada 1968. Presiden Soeharto ditunjuk sebagai Presiden dalam jangka waktu 5 tahun, artinya MPR yang terpilih tidak dapat mencabut mandatnya sampai tahun 1973. Orang-orang di sekeliling Soeharto yang sangat membantunya diantaranya, adalah Ali Murtopo,<sup>83</sup> yang membentuk suatu Operasi Khusus (Opsus) yaitu suatu badan yang membantunya dalam penyelesaian masalah konfrontasi dengan Malaysia. Amir Machmud (Kodam Jakarta) yang telah menjaga keamanan pada sidang MPRS (1968) pada penetapan Soeharto menjadi Presiden. Amir Machmud kemudian ditunjuk sebagai menteri dalam negeri enam bulan sebelum Pepera/Penentuan jajak Pendapat (1968) dan mengatur pelaksanaannya. Ali Murtopo mendapat tugas untuk mempertahankan Irian Barat sebagai wilayah Indonesia. Dengan mengirimkan banyak barang-barang

---

<sup>81</sup> Sutangkang Suwalu, *Peran Nasution dalam antar Soeharto Ke Puncak Kekuasaan*, lihat situs: <http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html>.

<sup>82</sup> Melalui ketetapan MPRS No. III/Res/MPRS/1966, Marwati Djoened, *op. cit.*, hlm. 418-419.

<sup>83</sup> Ali Murtopo dikenal oleh Soeharto, pada saat Soeharto memimpin operasi Mandala, yaitu operasi untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda, Soeharto pada waktu itu (1959-an) menjabat Brigadir Jenderal, Ali Murtopo menjabat Mayor.

untuk orang-orang di Irian Barat, agar memenangkan Pepera untuk memilih tetap dalam wilayah Indonesia.<sup>84</sup>

Soeharto akhirnya menjadi Presiden, seorang jenderal yang berjasa menyingkirkan kaum komunis baik secara politis maupun secara sosial. Soeharto benar-benar tidak hanya sekadar mengantarkan dirinya ke puncak karir politik, tapi juga membuat institusi TNI terutama angkatan darat menjadi institusi yang "dielakukan" rakyat banyak. Seorang perwira militer naik menjadi presiden dan mengakhiri pemerintahan sipil di Indonesia tanpa melalui perebutan kekuasaan.

Dibandingkan dengan Soekarno, yang membawa Indonesia dalam sebuah sistem perpolitikan dunia, dengan ide-idenya tentang Nasakom, pemerintahan Soeharto ini lebih mengedepankan pada pembangunan ekonomi, pemerintahan Soeharto berusaha menjauhkan diri dari Komunis.

Pada awal pengenalannya, digambarkan Orde Baru merupakan reaksi atas segala penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Lama dan oleh karena itu harus dilakukan koreksi total. Pidato Pejabat Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1967 :

...Dengan demikian, orde Baru tidak lain adalah tatanan seluruh peri kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kami garis bawahi di sini kata-kata "diletakkan kembali", karena Orde Baru lahir dan tumbuh sebagai reaksi dan mengadakan koreksi total atas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan pada masa Orde yang berkuasa waktu itu, yang sekarang disebut Orde Lama.

Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah terjadi pada masa Orde Lama, telah membawa akibat yang sangat luas dan

---

<sup>84</sup> Ken Ward, *op.cit.*, hlm 9

untuk mengadakan koreksi total atas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan pada masa Orde Lama, telah membawa akibat yang sangat luas; bahkan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara...Penyelewengan serius terhadap UUD 1945 terjadi dengan memusatnya kekuasaan secara mutlak pada satu tangan, yaitu kepala negara. Asas dan sendi negara hukum lambat laun ditinggalkan, sehingga akhirnya menjadi negara yang berdasarkan kekuasaan. Asas dan sendi sistem konstitusi, dalam praktek berubah sehingga bersifat absolutisme. Kekuasaan tertinggi bukan lagi ditangan MPR(S), melainkan ditangan Pemimpin Besar Revolusi. Presiden bukannya tunduk pada MPR(S), bahkan sebaliknya MPR(S) yang ditundukkan di bawah Presiden".

Sila peri-kemanusiaan yang adil dan beradab ditinggalkan; hak-hak asasi manusia hampir hampir lenyap sebab semuanya ditentukan oleh kemauan penguasa. Jaminan dan perlindungan hukum hampir tidak ada".

"Sila kedaulatan rakyat menjadi kabur; yang ada adalah kedaulatan pemimpin".

"Sila keadilan sosial semakin jauh, sebab kekayaan negara dipakai untuk kepentingan pribadi..."<sup>85</sup>

Jadi Orde Baru ini memproklamirkan dirinya sebagai wujud pelurusan kembali perjalanan bangsa menuju cita-cita nasional, dengan melaksanakan Pancasila dan UUD '45 secara murni dan konsekuen. Serta merupakan koreksi total terhadap Orde Lama.

Pemerintahan Orde Baru sangat mendukung mengenai pemberantasan sisa-sisa gerakan 30 September PKI. Terjadi banyak pembunuhan pada waktu awal-awal Orde Baru ini pada kader-kader dan simpatisan Partai komunis Indonesia. Robert Cribb mengatakan:

... pembantaian tahun 1965 dilakukan dengan memakai alat sederhana: pisau, golok, dan senjata api. Orang yang dieksekusi juga tidak dibawa jauh sebelum dibantai, biasanya mereka terbunuh di dekat rumahnya. Ciri lain, kejadian itu

<sup>85</sup> Pidato Kenegaraan 1967 Disampaikan oleh Pejabat Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto di depan Sidang Perwakilan Rakyat Gotong Royong tanggal 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto *Amanat Kenegaraan*, "Kumpulan Pidato Kenegaraan di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, jilid I 1967-1971 (Jakarta: INTI IDAYU PRESS, 1985), hlm. 8.

## **BAB III**

### **GOLKAR PADA PEMILU 1971**